

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Mangunhardjana. *Isme-Isme Etika dari A sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amirrudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2013.
- _____ dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Aristo Pangaribuan, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Bambang Waluyo. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- _____. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP Baru*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2011.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2016.

- _____ dan Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2025.
- Erwin Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Cetakan ke-4. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- _____. *Restorative Justice: Gerakan Sosial Masyarakat Global dalam Upaya Memulihkan Keadilan*. Jakarta: UI Publishing, 2024.
- H. Jawade Hafidz Arsyad. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harun M. Husein. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Howard Zehr. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse. PA: Goodbook, 2002.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cet.4. Ed. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Jan Remelink. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Kholilur Rahman. *Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2024.

- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Mardjono Reskodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994.
- Marian Liebmann. *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Mark Umbreit. *Avoiding the Marginalization and McDonalldization of Victim-Offender Mediation: A Case Study in Moving Toward the Mainstream in Restorative Juvenile Justice Repairing the Harm of Youth Crime*. Edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave Monsey. NY: Criminal Justice Press, 1999.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip, 1995.
- P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1989.
- _____ dan Fransiscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- _____ dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Edisi Revisi): Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2019.
- Philipus M. Hadjon, dkk. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2012.
- R.M. Surachman dan Jan S Maringka. *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Ed. Revisi. Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- S. Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan 10. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- S.R. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2019.
- Sjahran Basah. *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed. 1. Cet. 21. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
- Sri Mamudji, et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Topo Santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed. 1. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi ke-3.
Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

_____. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1983.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Straftrechct*)).

Dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN
Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU Nomor 16 Tahun
2004, LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN Nomor 4401.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU Nomor 11 Tahun 2021, LN
Tahun 2021 Nomor 298, TLN Nomor 6755.

Indonesia. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 30
Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 292, TLN Nomor 5601.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana*. UU
Nomor 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842.

Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam
KUHP*. Perma Nomor 02 Tahun 2012.

Kejaksaan RI. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Kepolisian RI. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Perma Nomor 1 Tahun 2024.

C. JURNAL

Angela J. Davis. “*The Power and Discretion of the American Prosecutor*”. *Open Edition Journals* 2005-1.

Cahya Wulandari. “*Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”. *Jurnal Jurisprudence* (Vol. 10, No. 2, 2020).

Hendry Yoseph Kindangan. “*Diskresi Penuntutan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Eropa*”. *Jurnal The Prosecutor Law Review* (Volume 1, No. 1, April 2023).

Kuat Yudi Prayitno. “*Restoratif Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”. *Jurnal Dinamika Hukum* (Vol. 12, No 3, September 2023).

Lutfil Ansori. “*Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*”. *Jurnal Yuridis* (Vol.2, No. 1 Juni 2015).

M G Gertz & L B Myers. “*Prosecutorial Decision Making in the Netherlands: A Research Note*”. *Journal of Criminal Justice* Volume: 18 Issue: 4 Dated: (1990) Pages: 359-368.

Rebecca Krauss. “*The Theory of Prosecutorial Discretion in Federal Law : Origins and Developments*”. *Seton Hall Circuit Review* (Vol. 6:1 2009).

Ronald F Wright dan Rodnef F Langen. “*The Effective of Depth and Distance in a Criminal Code on Charging, Sentencing and Prosecutor Power*”. *North California Law Review* Vol. 84 tanggal 15 September 2006.

Susan C. Hall. “*Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System*”. *Duquesne University School of Law Research Paper* (No. 2012-11).

Wayne R. LaFave. “*The Prosecutor’s Discretion in the United States*”. *The American Journal of Comparative Law* (Volume 18, Issue 3, Summer 1970, Pages 532-548).

D. DOKUMEN / MAKALAH

Barda Nawawi Arief. “*Kepolisian Dalam perspektif Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan pidana*”. Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia III tentang Polri Sipil yang Mandiri, Berdaya dan Profesional untuk Menjamin Integritas Bangsa, Undip, tanggal 22-23 Oktober 1998.

Harkristuti Harkrisnowo. “*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”. Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Imu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003.

Marwan Effendy. “*Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Makalah disampaikan pada acara pengukuhan sebagai Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi, Manado, 4 Oktober 2012.

Naskah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana, tanggal 3 Maret 2024.

Soetanto Soepiadhy. *"Keadilan Hukum"*. Surabaya Pagi, 28 Maret 2012.

E. TESIS / DISERTASI

Adiyaksa. *"Analisis Diskresi Kejaksaan dalam Penuntutan"*. Tesis Universitas Indonesia, 2003.

Eva Achjani Zulfa. *"Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)"*. Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Anderson, A.M. *"Alternative Disposal of Criminal Cases by the Prosecutor: Comparing the Netherlands and South Africa"*. Thesis Universiteit van Amsterdam, 2014.

Laurene Soubise. *"Prosecutorial Discretion and Accountability: a Comparative Study of France and England and Wales"*. Phd Thesis, University of Warwick, 2015.

Febby Mutiara Nelson. *"Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement"*. Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 2019.

Marcus Lukman. *"Eksistensi Peraturan Kebijakanaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional"*. Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.

Rudi Pradisetia Sudirdja. *"Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum dan Kepentingan"*. Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 2023.

Suriyani. *"Independensi Kejaksaan di Indonesia serta Perbandingannya dengan Kejaksaan di Berbagai Negara"*. Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

F. KAMUS HUKUM

Henry Campbell Black, Joseph R. Nolan, and Jacqueline M. Nolan-Haley. *Black's Dictionary-With Pronunciations*. Sixth Edition. St. Paul Minnesota: West Publishing, 1990.

Henry Campbell Black. *Black Law Dictionary*. Second Edition. St. Paul Minnesota: West Publishing, 1910.

M. Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

G. WEBSITE

Sara Sun Beale. "Prosecutorial Discretion in Three Systems: Balancing Conflicting Goals and Providing Mechanisms for Control, in Discretionary Criminal Justice in a Comparative Context", https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/3266/, diakses 9 Februari 2025.

International Criminal Court. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RelatedRecords/CR2019_07328.PDF, diakses 9 Februari 2025.

U.S. Department of Justice. “Principles of Federal Prosecution”.
<https://www.justice.gov/jm/jm-9-27000-principles-federal-prosecution>,

diakses 9 Februari 2025.

Geelhoed, W. dan Novak, C. “Embedding the European Public Prosecutor’s Office in Jurisdictions with a Wide Scope of Prosecutorial Discretion: the Dutch Example”.

<https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2856430/download>, diakses 12 Februari 2025.

R.E. (Rosa) van Zijl. “Case Dismissal: Legality Principle v. Prosecutorial Discretion”.

https://ecba.org/extdocserv/conferences/Riga2022/2Panel_EPPO_vZijl.pdf, diakses 12 Februari 2025.

Jan J.M. van Dijk. “The Use of Guidelines by Prosecutors in The Netherlands”.

Ministry of Justice, The Hague, Netherlands, 1983,

<https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/93241NCJRS.pdf>, diakses 12 Februari 2025.

Jacqueline Hodgson & Laurene Soubise. “Prosecution in France”,

<https://academic.oup.com/edited-volume/41333/chapter/352363260>, diakses 12 Februari 2025.